

Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks dan *Hate Speech* pada Pemilihan Umum di Mandailing Natal

Ahmad Salman Farid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
ahmadsalmanfarid@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the communication strategy of the local government in overcoming the spread of hoaxes and hate speech during the general election in Mandailing Natal, Sumatra. The spread of hoaxes and hateful information on social media has become a serious problem that can affect the integrity and stability of the democratic process. The research method is a qualitative approach using in-depth interview techniques and analysis of social media content. The research respondents consisted of government officials, members of the public, and social media users who were active during the general election period. The study results show that local governments have implemented various communication strategies to overcome the spread of hoaxes and hate speech. The strategy includes educational campaigns, building community involvement, and collaboration with the media so that the local government's communication strategy has a positive impact on reducing the spread of hoaxes and hate speech.

Keywords: communication strategy; hoax spread; hate speech; general election; local government; Mandailing Natal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi komunikasi yang diadopsi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran hoaks dan hate speech selama pemilihan umum di Mandailing Natal. Penyebaran informasi palsu dan berbau kebencian di media sosial telah menjadi masalah serius yang dapat mempengaruhi integritas dan stabilitas proses demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan analisis konten media sosial. Responden penelitian terdiri dari pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan pengguna media sosial yang aktif selama periode pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai strategi komunikasi untuk mengatasi penyebaran hoaks dan hate speech. Strategi tersebut meliputi kampanye edukasi, membangun keterlibatan masyarakat serta kolaborasi dengan media sehingga strategi komunikasi pemerintah daerah berdampak positif dalam mengurangi penyebaran hoaks dan hate speech.

Kata kunci: strategi komunikasi; penyebaran hoaks; *hate speech*; pemilihan umum; pemerintah daerah; Mandailing Natal.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu proses penting dalam sistem demokrasi di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran hoaks dan *hate speech* melalui media sosial telah menjadi masalah yang serius dalam konteks pemilihan umum. Hal ini memiliki potensi untuk merusak integritas proses demokrasi dan mempengaruhi hasil pemilihan dengan memanipulasi opini publik.

Mandailing Natal, sebagai salah satu daerah di Indonesia, tidak luput dari masalah tersebut. Pemilihan umum di Mandailing Natal juga menghadapi tantangan dalam mengatasi penyebaran

hoaks dan *hate speech* yang dapat memicu konflik sosial, kebencian antar kelompok, dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan.

Strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* selama pemilihan umum di Mandailing Natal menjadi perhatian penting. Strategi komunikasi yang baik dapat membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran hoaks dan *hate speech*, memastikan informasi yang akurat dan valid tersedia, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari penyebaran informasi palsu dan berbau kebencian.

Hoaks merupakan informasi palsu atau tidak akurat yang disebar dengan tujuan menipu atau memanipulasi orang-orang yang menerimanya (Fauzi, A. 2018: 56). Hoaks sering kali dirancang untuk menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Tujuannya dapat bervariasi, mulai dari menyebarkan kebingungan atau ketakutan, mempengaruhi opini publik, hingga merusak reputasi individu, kelompok, atau lembaga tertentu. Sedangkan *Hate speech* (ujaran kebencian) mengacu pada penggunaan bahasa atau ekspresi yang melibatkan penghinaan, atau ancaman terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnisitas, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya. *Hate speech* sering kali digunakan untuk menyebarkan kebencian, memicu konflik sosial, atau menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dapat berdampak negatif pada individu atau kelompok yang menjadi sasaran.

Penting untuk mengenali dan menghindari penyebaran hoaks serta *hate speech*, karena keduanya dapat merusak integritas informasi, menciptakan ketidakstabilan sosial, dan mempengaruhi kehidupan individu secara negatif. Strategi komunikasi pemerintah daerah dapat membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran hoaks dan *hate speech*. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan faktual, pemerintah daerah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan penyebaran informasi palsu dan berbau kebencian. Kesadaran ini penting agar masyarakat dapat lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang diterima.

Melalui strategi komunikasi yang baik, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran hoaks dan *hate speech* (Herawati, D. M., 2016: 138). Dengan menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses, pemerintah daerah dapat membatasi penyebaran informasi palsu serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai isu-isu sensitif yang berpotensi memicu kebencian dan konflik. Strategi komunikasi yang baik dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang transparan, menjawab pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat dengan cepat, dan terlibat secara aktif dengan komunitas, pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi pemerintah dalam mengatasi masalah penyebaran hoaks dan *hate speech*.

Strategi komunikasi yang baik juga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech*. Dengan menyediakan platform komunikasi yang terbuka dan mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam menyebarkan informasi yang benar, melaporkan konten yang merugikan, dan berpartisipasi dalam kampanye edukasi untuk memerangi hoaks dan *hate speech* (Sitompul, et al. 2021: 261).

Hoaks dan *hate speech* dapat memiliki dampak yang merugikan, seperti memicu konflik sosial, memecah belah masyarakat, atau merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Melalui strategi komunikasi yang baik, pemerintah daerah dapat memberikan respons yang cepat dan tepat untuk mengatasi dampak negatif yang muncul akibat penyebaran hoaks dan *hate speech*. Hal ini meliputi memberikan klarifikasi, menjelaskan fakta, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan memahami pentingnya strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech*, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan terlibat dalam

melawan penyebaran informasi palsu dan berbau kebencian. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini, masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi komunikasi yang telah diadopsi. Penelitian sebelumnya terkait strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* pada pemilihan umum di Mandailing Natal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan ini dan memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan strategi komunikasi dalam menghadapi tantangan ini.

Meskipun strategi komunikasi ini telah diterapkan, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, serta kompleksitas dan dinamika penyebaran hoaks dan *hate speech* di media sosial. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech*. Rekomendasi tersebut mencakup perluasan program edukasi, peningkatan kerjasama dengan media massa dan platform media sosial, peningkatan kapasitas tim monitoring dan tanggap krisis, peningkatan transparansi informasi, dan penguatan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi publik dan teori komunikasi media massa. Kombinasi teori komunikasi publik dan teori komunikasi media massa dalam penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan mempengaruhi perilaku dan sikap audiens secara lebih luas dalam konteks masyarakat. Selain itu, integrasi teori-teori ini dapat membantu memahami peran media massa dalam membentuk opini publik dan menciptakan pengaruh sosial yang relevan dalam budaya informasi modern.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan pengguna media sosial yang aktif selama pemilihan umum di Mandailing Natal. Selain itu, analisis konten media sosial juga dilakukan untuk memahami pola penyebaran hoaks dan *hate speech* serta tanggapan masyarakat terhadap strategi komunikasi pemerintah daerah (Olivia, H., & Leonita, W. 2020: 60). Melalui kombinasi kedua metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penyebaran hoaks dan *hate speech* pada pemilihan umum di Mandailing Natal.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi dalam Islam ditekankan pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang benar, akurat, dan terverifikasi secara menyeluruh. Dengan menyediakan fakta yang jelas dan benar, pemerintah daerah dapat mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan konflik dan kebingungan di masyarakat. Islam mendorong penggunaan kata-kata yang bijaksana, lembut, dan menghormati dalam berkomunikasi. Strategi komunikasi pemerintah daerah harus mencerminkan prinsip-prinsip kesantunan ini untuk mencegah retorika yang berlebihan atau provokatif yang dapat meningkatkan ketegangan sosial. Islam mengajarkan pentingnya kepentingan bersama (*maslahah*) atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, pemerintah daerah harus menekankan pentingnya kesatuan, kerukunan, dan persatuan masyarakat di atas perbedaan dan perpecahan.

“Pemerintah Daerah Mandailing Natal telah mengadopsi beberapa langkah untuk mengidentifikasi dan menangani hoaks serta *hate speech* selama masa kampanye Pemilihan Umum. Pertama-tama, kami telah membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli komunikasi, intelijen, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pemantauan aktif media sosial dan platform digital lainnya. Tim ini bertugas mengidentifikasi konten yang mencurigakan dan

berpotensi berisi hoaks atau hate speech terkait dengan Pemilihan Umum” Bapak Martua (Kadis Kominfo/Juni 2023)

Melalui upaya di atas, Pemerintah Daerah telah mengidentifikasi dan mengawasi konten-konten yang mencurigakan, serta potensial mengandung hoaks atau ujaran kebencian yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga informasi yang akurat dan menjaga lingkungan kampanye yang sehat dan beradab. Dalam ajaran Islam, komunikasi yang baik ditandai dengan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kesantunan. Islam menekankan pentingnya berbicara dengan jujur, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan menggunakan kata-kata yang lembut dan bijaksana. Dalam konteks penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, prinsip-prinsip ini menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi yang efektif.

Komunikasi dalam Islam memiliki peran sentral dalam membangun dan memelihara hubungan harmonis antara individu dan masyarakat. Sebagai agama yang menekankan kebenaran dan keadilan, Islam menetapkan prinsip-prinsip yang ketat terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian. Dalam pandangan akademisi, hal ini merupakan wujud dari komitmen Islam untuk menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkomunikasi. Sebagai bagian dari etika komunikasi Islam, larangan terhadap hoaks menjadi sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang dengan pesatnya teknologi informasi dan media sosial. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya kebenaran dalam berkomunikasi:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kejahilan, lalu kamu menjadi penyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat [49]:6).

Selaras dengan ayat di atas, langkah Pemerintah Daerah juga melakukan verifikasi.

“Setelah konten diidentifikasi sebagai hoaks atau *hate speech*, langkah pertama kami adalah melakukan verifikasi. Tim kami berkolaborasi dengan lembaga terkait, seperti kepolisian dan badan intelijen, untuk memastikan kebenaran informasi dan mengumpulkan bukti terkait pelaku penyebaran. Selanjutnya, kami menerapkan pendekatan komunikasi yang beragam untuk merespons konten tersebut. Kami menyebarkan fakta yang jelas dan data resmi untuk membantah hoaks, serta menyuarakan pesan keberagaman dan persatuan untuk merespons *hate speech*”. Bapak Martua (Kadis Kominfo/Juni 2023)

Pesan ini menegaskan bahwa informasi harus diuji kebenarannya sebelum disebarkan untuk mencegah terjadinya perpecahan dan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, Islam juga melarang keras ujaran kebencian yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Smenyatakan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat [49]:11).

Pesan ini menggarisbawahi pentingnya menghormati kebebasan beragama dan menolak perilaku bermusuhan terhadap keyakinan orang lain. Sebagai dampak dari revolusi informasi dan media sosial, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar dengan cepat

dan luas. Oleh karena itu, para cendekiawan Muslim menekankan pentingnya literasi informasi dan kemampuan kritis dalam menganalisis berita yang diterima sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat, individu-individu akan lebih mampu membedakan antara fakta dan opini, serta menilai kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya.

Selain itu, dalam tradisi komunikasi Islam, ditekankan pula pentingnya menghindari fitnah dan pembicaraan yang berlebihan dalam menyebarkan informasi. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras tentang bahaya fitnah.

“Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perang mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. (Q.S. Al-Baqarah [2]:191).

Pesan ini mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam menyampaikan berita dan menghindari memperkeruh suasana dengan informasi yang tidak terverifikasi. Dalam rangka mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, komunikasi Islam juga menekankan pentingnya berbicara dengan santun dan menghindari bahasa yang menyinggung. Komunikasi yang baik harus diiringi oleh akhlak yang mulia, termasuk dalam menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda. Di samping itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam melawan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam menganalisis informasi. Pendidikan tentang pentingnya berkomunikasi dengan jujur, adil, dan menghormati orang lain akan membantu mengurangi dampak negatif dari hoaks dan ujaran kebencian dalam masyarakat.

Dalam kesimpulannya, komunikasi dalam Islam menegaskan larangan terhadap hoaks dan ujaran kebencian sebagai bagian dari etika berkomunikasi yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian harus didasarkan pada literasi informasi, kemampuan kritis, dan pendidikan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam ini, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh toleransi, dan saling menghargai dalam menyampaikan pesan dan berinteraksi satu sama lain.

Perkembangan teknologi yang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat melalui *platform* media digital dan media sosial telah membawa konsekuensi yang kompleks. Saat ini, informasi dapat dengan mudah tersebar di beranda media sosial melalui aplikasi yang diakses melalui ponsel pintar. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menuliskan apapun yang diinginkan di akun media sosial, dan semua orang dapat mengakses dan membaca informasi tersebut, termasuk informasi yang tidak benar (hoaks). Pengguna media sosial ditemukan ada yang memanfaatkannya dengan cara yang salah. Terkadang pengguna media sosial menyebarkan informasi palsu yang dibuat seolah-olah itu adalah berita yang benar, padahal sebenarnya hanya berita bohong. Hal ini juga berlaku untuk sebagian wartawan yang tidak memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya melalui platform media digital dan media sosial. Informasi palsu atau hoaks ini kemudian dikonsumsi oleh publik yang pada akhirnya hanya memperkuat propaganda dan merusak pola pikir masyarakat.

Kampanye Edukasi Dalam Komunikasi Publik

Kampanye edukasi tentang bahaya penyebaran hoaks dan *hate speech* merupakan langkah yang penting dalam upaya membangun kesadaran masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam kampanye edukasi:

1. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi

Pemerintah daerah Mandailing Natal mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas. Informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan mudah dipahami agar dapat mencapai berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten merupakan kunci dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* di Mandailing Natal. Dengan pendekatan yang tepat dan strategi komunikasi yang benar, masyarakat di Mandailing Natal dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya menyebarkan informasi yang benar dan positif serta menghindari ujaran kebencian yang merusak kesatuan dan harmoni sosial.

2. Pelatihan dan Workshop

Pemerintah daerah Mandailing Natal melakukan pelatihan dan workshop bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk siswa, guru, komunitas, dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang tanda-tanda hoaks dan *hate speech*, serta dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu, peserta juga diajarkan tentang pentingnya berperan aktif dalam menghindari penyebaran dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Peserta diberikan pengetahuan tentang cara memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke media sosial atau kelompok lainnya, sehingga dapat lebih bijaksana dalam menyebarkan informasi yang benar dan terpercaya. Dengan demikian, pelatihan dan workshop ini berfungsi sebagai upaya pencegahan dalam mengurangi penyebaran hoaks dan *hate speech* di masyarakat, serta membentuk kesadaran kolektif untuk memerangi penyebaran informasi palsu yang merusak stabilitas sosial.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan

Kerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, menjadi langkah efektif dalam menyampaikan edukasi tentang bahaya penyebaran hoaks dan *hate speech*. Dalam kerja sama ini, sekolah dapat memasukkan materi tentang hoaks dan *hate speech* ke dalam kurikulum pembelajaran. Melalui pelajaran khusus atau modul yang didesain dengan baik, siswa dapat belajar mengenali hoaks, memahami dampak negatifnya, dan belajar menghindari penyebaran informasi palsu. Selain itu, sekolah juga dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang membahas masalah hoaks dan *hate speech* secara lebih mendalam. Diskusi kelompok, lokakarya, atau debat terbuka tentang isu-isu yang relevan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang kompleksitas masalah ini. Dengan melibatkan lembaga pendidikan, pesan-pesan tentang bahaya hoaks dan *hate speech* dapat sampai kepada generasi muda secara langsung, sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di masyarakat.

4. Kolaborasi dengan Media Massa

Dalam teori komunikasi media massa, pemerintah daerah Mandailing Natal menjalin kerja sama erat dengan media massa sebagai upaya untuk menyebarkan pesan-pesan edukatif mengenai bahaya penyebaran hoaks dan *hate speech*. Melalui kolaborasi ini, informasi yang akurat dan penting tentang masalah hoaks dan *hate speech* dapat dengan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Media massa, seperti radio, surat kabar, dan televisi, memiliki jangkauan yang luas ke berbagai lapisan masyarakat di daerah tersebut. Dengan memanfaatkan media massa ini, pesan-pesan edukatif dapat disampaikan secara konsisten dan menyeluruh. Kerja sama ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali hoaks, memverifikasi informasi, dan menghindari penyebaran ujaran kebencian. Melalui pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan *hate speech* dapat meningkat, dan masyarakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi serta lebih mampu menilai kebenaran informasi yang beredar.

Kampanye edukasi harus berkelanjutan dan berkesinambungan sebab akan membantu memperkuat kesadaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam mengenali dan menghadapi

hoaks dan *hate speech*, serta mendorong perubahan perilaku yang positif dalam penggunaan media sosial dan penyebaran informasi.

Keterlibatan Masyarakat

Respon masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* dapat bervariasi tergantung pada tingkat kesadaran dan keterlibatan individu serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait.

“Respon masyarakat secara umum cukup positif. Banyak warga yang menyambut baik kampanye pencegahan hoaks dan *hate speech* yang kami lakukan. Masyarakat merasa senang karena kami memberikan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, kami juga menyaksikan semakin banyak warga yang berpartisipasi aktif dalam melaporkan konten yang mencurigakan kepada tim kami. Namun, tentu saja, ada juga beberapa tantangan, seperti persebaran hoaks yang cepat dan sulitnya mengatasi *hate speech* yang bisa menyulut emosi masyarakat”. Bapak Martua (Kadis Kominfo/Juni 2023)

Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech*:

1. Pelaporan Konten Merugikan

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam mengatasi permasalahan penyebaran hoaks dan *hate speech* di era digital. Di tengah kemajuan teknologi dan luasnya akses masyarakat terhadap media sosial dan platform digital lainnya, muncul berbagai konten yang merugikan, mencoreng citra, dan bahkan memecah belah masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan untuk membantu menangkal penyebaran hoaks dan *hate speech* yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan persatuan dalam masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sangat relevan adalah melalui pelaporan konten merugikan yang ditemui di media sosial atau platform digital lainnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjadi mata dan telinga tambahan bagi pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah dan lembaga yang memiliki tugas dalam penanganan kasus hoaks dan *hate speech*. Dengan keterlibatan masyarakat, proses identifikasi, penanganan, dan pencegahan penyebaran konten negatif dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Ketika masyarakat menemui konten yang dianggap sebagai hoaks atau *hate speech*, masyarakat dapat secara aktif melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melapor melalui saluran resmi pemerintah daerah yang sudah ditetapkan untuk tujuan tersebut. Misalnya, portal laporan hoaks dan *hate speech* yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaporan ini dapat mencakup informasi rinci tentang konten yang diragukan, sumbernya, serta alasan mengapa konten tersebut dianggap sebagai hoaks atau *hate speech*. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan platform atau fitur pelaporan yang disediakan oleh media sosial atau platform digital yang digunakan. Fitur ini biasanya dirancang untuk memfasilitasi pelaporan konten yang melanggar kebijakan penggunaan dan pedoman perilaku pengguna. Melalui fitur pelaporan ini, masyarakat dapat melaporkan konten yang mencurigakan dan berkontribusi dalam mengawasi lingkungan digital yang lebih aman dan bermartabat.

Peran masyarakat dalam melaporkan konten merugikan tidak hanya membantu pemerintah daerah dan lembaga berwenang dalam mengidentifikasi sumber dan penyebaran hoaks serta *hate speech*. Lebih dari itu, pelaporan masyarakat juga dapat menjadi pelengkap upaya pengawasan yang dilakukan oleh platform digital itu sendiri. Sehingga, proses pemantauan dan tindakan perbaikan terhadap konten negatif dapat menjadi lebih terukur dan efektif.

Pelaporan konten merugikan harus didasarkan pada fakta yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat perlu menghindari berkontribusi dalam menyebarkan hoaks atau *hate speech* lebih lanjut dengan cara membabi buta melaporkan tanpa memverifikasi terlebih dahulu kebenaran informasi yang diterima.

Selain pelaporan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya hoaks dan *hate speech* juga tetap menjadi prioritas. Dalam upaya melibatkan masyarakat, pemerintah daerah perlu melakukan kampanye sosialisasi secara berkelanjutan dan menyediakan informasi yang jelas tentang cara melaporkan konten merugikan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, kegiatan komunitas, dan platform online untuk mencapai cakupan yang lebih luas.

Dalam kesimpulannya, keterlibatan aktif masyarakat melalui pelaporan konten merugikan merupakan salah satu langkah strategis dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech*. Masyarakat memiliki peran penting sebagai mitra bagi pemerintah daerah dan lembaga berwenang dalam upaya menjaga kesatuan dan stabilitas sosial. Dengan partisipasi yang terus menerus, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi secara positif dalam menciptakan lingkungan digital dan sosial yang lebih aman, beretika, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat di Mandailing Natal.

2. Penyebaran Informasi Akurat

Partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi hoaks dan *hate speech* menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni di Mandailing Natal. Selain peran strategis pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki peran sentral dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terverifikasi kepada keluarga, teman, dan masyarakat luas. Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap individu memiliki akses yang luas untuk menyebarkan informasi, baik itu yang benar maupun yang palsu. Oleh karena itu, menjadi agen penyebar informasi yang benar adalah langkah penting yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk melawan hoaks dan *hate speech* serta meningkatkan kesadaran publik tentang bahayanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, informasi dapat dengan mudah dan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Namun, sifat cepat dan mudahnya menyebarkan informasi ini juga membawa risiko penyebaran hoaks yang tak terkendali. Hoaks dapat mengacaukan opini publik dan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Begitu pula dengan *hate speech*, yang dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Oleh karena itu, menjadi penyampai informasi yang akurat dan terverifikasi sangatlah penting untuk menghindari penyebaran hoaks dan *hate speech*.

Masyarakat memiliki peran strategis dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Sebelum menyebarkan berita atau informasi, penting bagi setiap individu untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa dan memverifikasi sumber informasi dari berbagai sumber terpercaya. Selain itu, ketika menerima informasi dari orang lain, ada baiknya untuk melakukan cross-check dengan sumber lain sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Menyebarkan informasi yang benar dan terverifikasi dapat membantu mencegah penyebaran hoaks yang merugikan masyarakat.

Selain itu, penting untuk membekali diri dengan keterampilan literasi digital. Dalam era informasi yang begitu banyak, keterampilan literasi digital menjadi modal penting untuk mengenali dan menghindari hoaks dan *hate speech*. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk memilah informasi, memverifikasi kebenaran, dan menyaring konten yang dapat meresahkan atau menyesatkan. Masyarakat perlu belajar dan terus mengembangkan keterampilan ini agar dapat menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis.

Ketika mendapati hoaks atau *hate speech*, masyarakat juga dapat berperan sebagai penyebar informasi yang benar melalui media sosial atau grup diskusi yang dimiliki. Dalam menyampaikan informasi, penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak provokatif. Menyampaikan pesan dengan bahasa yang baik dan santun dapat membantu menyebarkan informasi dengan lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, kolaborasi antarwarga dan komunitas juga dapat menjadi langkah efektif dalam melawan hoaks dan *hate speech*. Dalam lingkup keluarga, komunitas, atau lingkungan sekitar, masyarakat dapat saling mengingatkan dan mendiskusikan informasi yang diterima. Diskusi dan tukar pikiran akan membantu masyarakat memahami dan menganalisis berbagai isu dengan lebih baik. Masyarakat juga dapat membentuk kelompok-

kelompok diskusi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi yang benar dan memberikan edukasi tentang bahaya hoaks dan *hate speech*.

Dalam upaya mengurangi penyebaran hoaks dan *hate speech*, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis dan waspada terhadap informasi yang diterima. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terverifikasi juga dapat membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan Mandailing Natal dapat menjadi daerah yang bebas dari hoaks dan *hate speech* serta masyarakat yang cerdas dan toleran dalam berkomunikasi di era digital ini.

3. Partisipasi dalam Kampanye Edukasi

Dalam upaya menanggulangi penyebaran hoaks dan *hate speech*, pemerintah daerah dan lembaga terkait melaksanakan kampanye edukasi yang berfokus pada kesadaran masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam kesuksesan kampanye ini. Masyarakat didorong untuk menghadiri berbagai acara seperti seminar, lokakarya, atau kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif dari hoaks dan *hate speech*.

Melalui kampanye edukasi ini, pemerintah daerah berharap dapat mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar. Peserta seminar dan lokakarya diajak untuk memahami betapa berbahayanya hoaks, yang dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Selain itu, peserta juga diajarkan tentang pentingnya mengenali dan menghindari ujaran kebencian yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan sosial.

Partisipasi masyarakat dalam kampanye edukasi menjadi pilar utama untuk mencapai kesuksesan program ini. Melalui berbagai kegiatan interaktif, peserta didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pemikiran tentang isu-isu terkait hoaks dan *hate speech*. Hal ini menciptakan ruang yang inklusif dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya menyebarkan informasi yang benar dan akurat.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga memberikan dukungan dan dorongan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kampanye edukasi ini menciptakan efek domino dalam menyebarkan pesan-pesan penting ke berbagai lapisan masyarakat. Ketika masyarakat turut serta dalam kampanye edukasi, selanjutnya berperan sebagai duta yang menyebarkan informasi positif kepada keluarga, teman, dan komunitas. Dengan begitu, pesan-pesan tentang penyebaran hoaks dan *hate speech* akan mencapai lebih banyak orang dengan cara yang lebih personal dan meyakinkan.

Dalam kesimpulannya, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan kampanye edukasi pemerintah daerah dan lembaga terkait terhadap penyebaran hoaks dan *hate speech*. Dengan melibatkan masyarakat dalam seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, kesadaran tentang bahaya hoaks dan *hate speech* dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat menjadi lebih waspada dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan dalam masyarakat.

4. Pembentukan Komunitas Peduli

Masyarakat juga dapat terlibat dalam pembentukan komunitas peduli yang secara khusus berfokus pada pencegahan dan penanggulangan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Melalui komunitas ini, masyarakat dapat saling mendukung, berbagi informasi, dan melakukan tindakan nyata dalam memerangi penyebaran hoaks dan *hate speech* di lingkungan sekitar. Komunitas peduli ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, di mana informasi yang disebarkan dapat diverifikasi dan ujaran kebencian dapat diminimalisasi.

Dalam komunitas peduli, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diadakan secara rutin. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan narasumber yang ahli dalam bidangnya, seperti akademisi, tokoh agama, dan praktisi media, yang dapat

memberikan panduan dan pengetahuan mendalam tentang hoaks dan *hate speech*. Selain itu, diskusi kelompok dan lokakarya juga dapat diselenggarakan untuk mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota komunitas dalam berbagi pemahaman dan pengalaman terkait isu-isu tersebut.

Selain kegiatan sosialisasi, komunitas peduli juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan pencegahan. Dengan memanfaatkan kekuatan jejaring sosial, pesan-pesan positif dan kesadaran tentang hoaks dan *hate speech* dapat menyebar dengan lebih cepat dan luas, mencapai audiens yang lebih banyak, termasuk generasi muda yang aktif berada di dunia maya (Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. 2021: 33).

Selain berfokus pada sosialisasi dan penyebaran informasi, komunitas peduli juga dapat melakukan tindakan konkret dalam melawan penyebaran hoaks dan *hate speech*. Masyarakat dapat aktif melaporkan konten yang mencurigakan atau berpotensi merusak persatuan dan keharmonisan kepada pihak yang berwenang, seperti pihak berwenang atau platform media sosial yang bersangkutan. Dengan tindakan ini, masyarakat dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks dan *hate speech* secara efektif.

Secara keseluruhan, melalui komunitas peduli, masyarakat di Mandailing Natal dapat bersatu dalam upaya mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech*. Partisipasi aktif dari setiap anggota komunitas dalam menyebarkan informasi yang benar dan melawan ujaran kebencian merupakan langkah nyata menuju terciptanya lingkungan yang harmonis dan damai. Dengan kerjasama yang kokoh antara pemerintah daerah dan masyarakat, harapan untuk mencapai masyarakat yang kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi di era digital semakin mendekati kenyataan.

5. Pendidikan dan Kesadaran Individu

Partisipasi masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* di Mandailing Natal sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan kesadaran individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan untuk lebih kritis dalam menganalisis informasi yang diterima. Pendidikan dapat memberikan keterampilan kritis dan pemahaman tentang cara memverifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi ke orang lain.

Selain itu, tingkat kesadaran individu juga berperan penting dalam mencegah penyebaran hoaks dan *hate speech*. Kesadaran individu tentang dampak negatif dari menyebarkan informasi palsu dan ujaran kebencian dapat mendorong untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas sosial, semakin besar pula partisipasi mereka dalam mengatasi permasalahan ini (Rochmawati, N. 2018: 10).

Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* juga dipengaruhi oleh penerapan etika berkomunikasi yang baik. Dalam berkomunikasi di dunia maya, individu harus memahami bahwa setiap informasi yang dibagikan dapat memiliki dampak besar bagi masyarakat. Dengan berkomunikasi secara bijaksana dan bertanggung jawab, masyarakat dapat membantu mencegah penyebaran hoaks dan *hate speech* yang dapat merusak persatuan dan kerukunan di dalam masyarakat.

Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang penyebaran hoaks dan *hate speech* tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait harus berperan aktif dalam menyediakan edukasi yang tepat dan membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya dari permasalahan ini. Dengan melibatkan masyarakat, termasuk melalui pendekatan partisipatif dalam kegiatan sosialisasi, kampanye edukasi, dan kegiatan komunitas, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* di Mandailing Natal.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal sangat baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak buruk yang bisa timbul akibat penyebaran hoaks dan *hate speech*. Melalui berbagai

kampanye, program edukasi, dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kesadaran masyarakat terhadap bahaya tersebut telah meningkat.

Penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi negatif dari menyebarkan dan mempercayai hoaks serta *hate speech*. Melalui kampanye edukasi yang efektif, masyarakat menjadi lebih sadar akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran hoaks dan *hate speech*. Pemahaman masyarakat tentang konsekuensi negatif ini mencakup pemahaman akan potensi kerusakan reputasi, ketegangan sosial, konflik antar kelompok, serta potensi terjadinya kekerasan dan pembakaran emosi yang dapat terpicu oleh penyebaran hoaks dan *hate speech*. Masyarakat menjadi lebih peka terhadap pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta memahami bahwa penyebaran hoaks dan *hate speech* dapat merusak iklim sosial yang harmonis dan membahayakan stabilitas masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan lebih kritis dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta lebih berhati-hati dalam menghindari penyebaran konten yang berbau hoaks dan kebencian. Kesadaran ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan konten merugikan dan menyebarkan informasi yang akurat kepada orang-orang di sekitar. Namun demikian, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus melakukan kampanye dan edukasi yang berkesinambungan, mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inovatif, dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil guna menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks dan *hate speech*. Berikut salah satu bentuk hoaks yang terjadi di Mandailing Natal.



Gambar 1. Bukti Digital Penyebaran Hoaks di Kabupaten Mandailing Natal

Efendi Lubis, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan akibat beredarnya sebuah akun Facebook palsu yang mengatasnamakannya. Akun palsu tersebut menggunakan foto Efendi Lubis dan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama keluarga dan konstituen Efendi Lubis. Efendi Lubis merespons dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Efendi Lubis sangat prihatin dengan penyebaran akun palsu tersebut, karena dapat merugikan reputasinya dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa akun Facebook palsu tersebut

bukanlah miliknya dan tidak memiliki kaitan dengan aktivitas dan pernyataan yang dilakukannya sebagai Ketua DPRD Madina.

Dari kasus di atas, prinsip kebenaran dan kejujuran adalah dasar utama dalam membedakan kasus hoax dan *hate speech* menurut komunikasi Islam. Pemerintah daerah harus menegaskan pentingnya menyebarkan informasi yang benar, akurat, dan terverifikasi secara menyeluruh. Dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran, komunikasi dapat menjadi alat untuk memerangi hoaks dan menggugah kesadaran masyarakat akan bahayanya informasi palsu. Hal ini memerlukan keterbukaan dan transparansi dalam menyampaikan pesan, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima informasi dengan percaya diri. Hikmah dan kesantunan harus menjadi pilar dalam strategi komunikasi. Islam menekankan pentingnya menggunakan kata-kata yang bijaksana, lembut, dan menghormati dalam berkomunikasi. Retorika yang kasar dan provokatif dapat memperdalam perpecahan dan meningkatkan tensi sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjaga gaya komunikasi yang sopan dan mengedepankan pendekatan persuasif untuk membawa masyarakat bersama-sama dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Selanjutnya, mengedepankan kemaslahatan bersama adalah prinsip yang tak terpisahkan dalam Islam. Dalam konteks penyebaran hoaks dan *hate speech* pada pemilihan umum, pemerintah daerah harus menegaskan nilai-nilai persatuan, kerukunan, dan kesatuan dalam menyampaikan pesan komunikasi. Memahami dan mempromosikan bahwa kepentingan masyarakat lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kelompok akan membantu menekan munculnya pesan-pesan yang memicu konflik dan memperkuat rasa solidaritas di antara warga Mandailing Natal.

Pendidikan dan kesadaran menjadi elemen kunci dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech*. Pemerintah daerah harus memberdayakan masyarakat dengan informasi dan pengetahuan untuk mengenali hoaks, memverifikasi informasi, dan menyebarkan pesan yang positif. Melalui kampanye edukasi yang benar, masyarakat dapat lebih kritis dalam menghadapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi manipulatif yang dapat menyesatkan. Partisipasi aktif masyarakat juga perlu didorong dalam strategi komunikasi. Pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, pemuka masyarakat, dan organisasi sosial sebagai mitra dalam menyebarkan pesan-pesan damai. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal akan memperkuat jangkauan pesan dan membantu menyaring informasi yang dapat menyesatkan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung persatuan dan stabilitas.

Terakhir, sanksi hukum yang bijaksana dan transparan dapat menjadi instrumen terakhir dalam menangani penyebaran hoaks dan *hate speech*. Namun, perlu diingat bahwa langkah-langkah hukum harus selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan Islam dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sanksi harus diterapkan dengan itikad baik untuk membawa keadilan dan menjaga kedamaian, bukan untuk memperburuk situasi atau menutup kesempatan dialog dan rekonsiliasi.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran hoaks dan *hate speech* pada pemilihan umum di Mandailing Natal harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang menghargai kebenaran, keadilan, kesantunan, kemaslahatan bersama, dan pendidikan. Dengan memanfaatkan pendekatan persuasif, edukasi masyarakat, partisipasi aktif, dan sanksi hukum yang bijaksana, pemerintah daerah dapat berperan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang lebih sadar dan tanggap terhadap informasi yang beredar serta menciptakan suasana yang damai, harmonis, dan inklusif di tengah-tengah warga Mandailing Natal.

Penutup

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian mengenai strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran hoax dan *hate speech* pada pemilihan umum di Mandailing Natal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, strategi komunikasi pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran hoax dan *hate speech*. Responden

penelitian melaporkan adanya peningkatan pemahaman terhadap konsekuensi negatif dari menyebarkan dan mempercayai hoaks serta *hate speech*.

Kedua, respons dan keterlibatan masyarakat dalam melawan penyebaran hoaks dan *hate speech* juga meningkat. Masyarakat aktif melaporkan konten merugikan dan menyebarkan informasi yang akurat kepada keluarga dan teman-teman. Ketiga, strategi komunikasi pemerintah daerah telah berupaya menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses bagi masyarakat. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi resmi dari pemerintah daerah tentang pemilihan umum, dan merasa yakin dengan keakuratan informasi yang diterima. Keempat, strategi komunikasi pemerintah daerah berdampak positif dalam mengurangi penyebaran hoaks dan *hate speech*. Masyarakat melaporkan perubahan perilaku dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan lebih waspada terhadap konten yang berpotensi hoaks atau berbau kebencian.

Dalam perspektif Islam, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan dan perilaku individu maupun masyarakat. Terutama dalam konteks pemilihan umum di Mandailing Natal, di mana penyebaran hoaks dan *hate speech* dapat menyebabkan polarisasi dan keretakan sosial, strategi komunikasi pemerintah daerah menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adila, I., Weda, W., & Tamitiadini, D. (2019). Pengembangan Model Literasi Dan Informasi Berbasis Pancasila Dalam Menangkal Hoaks. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(1). <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.721>
- Arifin, N. F., & Fuad, A. J. (2021). Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(3). <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1430>
- Bakri, S., Zuhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). Menanggulangi Hoaks Dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Di Tahun Politik. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1833>
- Budiana, I. N., & Warta, I. M. (2019). Fighting Hoax and *Hate speech* by Strengthening The Spirit of Pancasila in Preventing Disintegration of The Nation. *International Journal of Sociological Jurisprudence*, 2(2).
- Cahyani, I. P. (2019). Digital Literacy of Lecturers As Whatsapp Group Users In Spreading Hoax Informations And *Hate Speech*. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.33021/exp.v2i2.562>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2014). *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*. In *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Fauzi, A. (2018). Memahami Literasi Media Baru dalam Penyebaran Informasi Hoax dan *hate speech* (Studi Fenomenologi Dosen Pengguna Facebook dan Whatsapp). In *PROMEDIA* (Issue 2).
- Gani, A. W., Asriadi, M., & Angriawan, T. (2020). Peran Pemuda dalam Menangkal Hoax dan *Hate speech*. *SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*.
- Hartono, B., Seregig, I. K., & Wibowo, B. (2021). Strategies in Countering Hoax and *Hate speech* in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.22225/scj.4.2.2021.134-144>
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan *Hate speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat The Spread of Hoax and *Hate speech* as The Representation of Freedom of Opinions Abstract: Abstraksi: *Pramedia*, II(2).
- Ilmi, M. H. (2021). Peribahasa Urang Banjar Perspektif Islam dalam Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5422>

- Olivia, H., & Leonita, W. (2020). Dinamika Komunikasi Humas Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Memberantas Hoax Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *KOMUNIKATA57*, 1(2). <https://doi.org/10.55122/kom57.v1i2.164>
- Prakoso, F. A., & Ramadhan, Z. (2022). Sosialisasi etika bermedia sosial pada siswa SMK Muhammadiyah Parung, Kabupaten Bogor. *Altruis: Journal of Community Services*, 3(2). <https://doi.org/10.22219/altruis.v3i2.20862>
- Putri Cahyani, I. (2019). Understanding The New Media Literacy In Spreading Hoaxes And *Hate Speech*. *Book Chapters of The 1st Jakarta International Conference on Social Sciences and Humanities (JICoSSH)*, 3. <https://doi.org/10.33822/jicossh.v3i0.18>
- Rahmadhany, A., Aldila Safitri, A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan *Hate speech* pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Rochmawati, N. (2018). Peran Guru Dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur Pada Anak. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30659/jspi.v1i2.3203>
- Rubaidi, R. (2020). Islamic Populism in Post-Truth Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 15(02). <https://doi.org/10.21274/epis.2020.15.02.265-286>
- Siregar, F. E. (2020). The Role of the Elections Supervisory Agency to Contend Hoax and *Hate speech* in the Course of 2019 Indonesian General Election. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a2>
- Sitompul, G. A., Deavvy M.R.Y. Johassan, Dyah Nurul Maliki, & Yosef Dema. (2021). Penyuluhan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mencegah Penyebaran “Hoax” dan “*Hate speech*” Bagi Kalangan Pelajar SMU dan Mahasiswa di Wilayah Jabodetabek pada Masa Pandemi COVID-19. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i2.649>